

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Irwansyah Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media. 2021.
- Maringan Masry Simbolon. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.
- Nur Basuki Winanrno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Nur Yanto. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bogor: Mitra Wacana Media. 2015.
- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2008.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

B. Jurnal dan Tugas akhir

- Ateng Syafrudin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Asaf, M. Y., & Tenri, A. "Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), (2025). Hlm : 6277.
- Basiro, D. *Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah* (Doctoral dissertation, Tadulako University). (2015).

- Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2024).
- Berg, E., & Arif, M. R. “ Peran Inspektorat Daerah Sebagai Konsultansi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara”. *Manor: Jurnal Manajemen dan Organisasi Review*, 6(2), (2024) hlm : 315-329.
- Elieser Yohanes. “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan”. *Jurnal Paradigma (JP)* 7, no. 2 (2018).
- Haris, A., Kusmanto, H., & Mardiana, S. “ Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1), (2016). hlm. 110–128.
- Husein, R. *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). (2025).
- Siwy, M. I., Saerang, D. P., & Karamoy, H. (2016). Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 7(2).
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Rantung, M. I., Tarore, S. V., & Posumah, E. “ Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), (2023). hlm : 79-86.
- Ibad, Syahrul. “Hukum Administrasi Negara dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik”. *HUKMY Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1, (2021).
- Indro harti, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, 2004

- Mainita, M., Soleh, A., & Syafaat, A. “Analisis Strategi dan Kinerja Aparatur Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), (2022). Hlm : 259-263.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. "Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8, no. 2 (2017). hlm 21.
- Marlaini, Aliamin, Mirna Indriani. “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada salah satu Inspektorat di Aceh”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusalam*, Vol. IV, No.3, (2018).
- Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby. “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)”.*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019).
- Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang, Makalah Universitas Airlangga”, Surabaya,
- Prijono, W. P., Cahyono, D., Qomariah, N., & Nursaid, N. “ Usaha Meningkatkan Kinerja Pegawai SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jember”. *Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 9(1), (2019). hlm : 20-33.
- Wiyasto, Y. A. “ Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Aparat Pengawas Internal Pemerintah Aparat Penegak Hukum Tahun 2018-2023 Di Pemerintah Kabupaten Madiun:(Studi Inspektorat Kabupaten Madiun)”. *Dinamika Hukum*, 15(1). (2024). hlm : 244.
- Yohanes, E. “Peran aparat pengawas intern pemerintah (apip) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten bulungan”. *Jurnal paradigma*, 7(2), (2018). hlm: 55-64.

C. Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.